

**PRAKTIK POLITIK IDENTITAS MENUJU PEMILU 2024 DAN
PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI**

Moch. Awin Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jl. Ahmad Yani No.117 Surabaya

Oktaviani Ahda Nur Rohmah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jl. Ahmad Yani No.117 Surabaya

Salwa Nur Hidayah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jl. Ahmad Yani No.117 Surabaya

Kholilurrohman

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jl. Ahmad Yani No.117 Surabaya

Email: 05040421106@student.uinsby.ac.id

Naskah dikirim: 13/12/2023, direvisi: 15/01/2024, diterima: 17/01/2024

Abstract

Identity politics is a political strategy that uses social identities such as ethnicity, religion or gender to gain electoral support. This article explains how the practice of identity politics affects elections and democracy. The 2024 general election in Indonesia is important because the practice of identity politics can affect the outcome. Political parties use ethnic or religious identity to gain support from certain groups, without considering important issues such as public policy or government performance. The practice of identity politics has an impact on democracy. The focus on identity can threaten social unity and national cohesion. Important issues such as economic development, welfare and justice can be neglected. In addition, the practice of identity politics often triggers polarization and conflict between groups. To safeguard democracy, voters should vote based on policy substance and candidate quality, not just identity. Political parties also need to change their approach, focus on relevant issues and build understanding between groups. This article explores the practice of identity politics in the 2024 general election and its impact on democracy. With a better understanding, it is

hoped that awareness of the importance of voting based on policy substance and strengthening the principles of inclusive and sustainable democracy can grow.

Keywords: *Identity politics, Election, Democracy.*

Abstrak

Politik identitas adalah strategi politik yang menggunakan identitas sosial seperti suku, agama, atau gender untuk memperoleh dukungan elektoral. Artikel ini menjelaskan bagaimana praktik politik identitas mempengaruhi pemilihan umum dan demokrasi. Pemilihan umum 2024 di Indonesia menjadi penting karena praktik politik identitas dapat memengaruhi hasilnya. Partai politik menggunakan identitas etnis atau agama untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan isu-isu penting seperti kebijakan publik atau kinerja pemerintah. Praktik politik identitas berdampak pada demokrasi. Fokus pada identitas dapat mengancam kesatuan sosial dan kohesi nasional. Isu-isu penting seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan bisa terabaikan. Selain itu, praktik politik identitas sering memicu polarisasi dan konflik antar kelompok. Untuk menjaga demokrasi, pemilih harus memilih berdasarkan substansi kebijakan dan kualitas calon, bukan hanya identitas. Partai politik juga perlu mengubah pendekatan mereka, fokus pada isu-isu yang relevan dan membangun kesepahaman antar kelompok. Artikel ini mengeksplorasi praktik politik identitas dalam pemilihan umum 2024 dan dampaknya terhadap demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan kesadaran akan pentingnya memilih berdasarkan substansi kebijakan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tumbuh.

Kata Kunci: Politik Identitas, Pemilu, Demokrasi.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara merdeka dengan wilayah yang luas, telah mengembangkan identitas nasional yang khas, membedakannya dari negara lain. Proses pembentukan identitas nasional ini melalui rentang sejarah yang panjang, dimulai dari masa penjajahan hingga perjuangan merebut kemerdekaan. Saat ini, Indonesia diakui sebagai negara yang memajemukan, di mana keberagaman suku, agama, ras, dan budaya menjadi ciri khas yang kuat. Keberagaman ini bukan hanya sekadar fenomena, tetapi telah menjadi bagian integral dari jati diri Indonesia. Dalam keberagaman ini, terdapat kekayaan

nilai-nilai yang memperkaya mosaik budaya dan identitas nasional Indonesia, menjadikannya sebagai contoh penting bagi negara-negara lain dalam mewujudkan harmoni di tengah perbedaan yang ada. Identitas nasional yang inklusif ini menegaskan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan aset yang memperkuat fondasi bangsa, menandai Indonesia sebagai landasan harmoni antarbudaya dan alat penting dalam membangun identitas yang kokoh di panggung global.

Keberagaman masyarakat Indonesia membuat seluruh masyarakat harus mampu beradaptasi satu sama lain. Keberagaman masyarakat Indonesia juga rentan terhadap konflik dan perselisihan, oleh karena itu munculnya konflik-konflik tersebut dapat berdampak pada sebagian masyarakat, dimana kondisi kehidupan politik nasional saat ini telah mendorong semua pihak secara sadar untuk melakukan upaya nyata dalam memperkuat dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat Indonesia. rakyat nilai-nilai keberagaman dalam Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, multietnik dan bangsa yang mempunyai kemampuan dan daya tahan dalam menjaga keharmonisan keberagaman suku, kebangsaan, bahasa, adat istiadat dan agama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.¹

Saat ini, politik identitas sangat sensitif terhadap peristiwa. Dalam iklim politik seperti ini juga dirasakan di musala yang harusnya steril dari kepentingan politik, hal yang tidak kalah pentingnya. Perekonomian global saat ini sedang menghadapi resesi yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini tentu menjadi faktor berbahaya bagi situasi politik di tahun 2024. Faktor lainnya adalah persiapan teknis penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang tidak mudah dan sulit. Pada tahun yang sama, pemilu provinsi dan situasi politik, dampak pemilu secara nasional. juga dapat menyebar ke banyak daerah karena kesehatan mental. Sifat masyarakat Indonesia tidak lepas dari perasaan primitif dan sektarianisme yang masih mengakar kuat dalam budaya

¹ Aldho Faruqi Tutukansa, "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia," 2019, 67.

masyarakat Indonesia, meskipun hidup di era demokratisasi terbuka dan digitalisasi modern. Politik identitas selalu dicap pada tokoh-tokoh muslim ketika agama lain melakukan hal yang sama, bahkan politik suku juga politik identitas, seperti menjadi orang Jawa, menjadi Sumatra, menjadi Sulawesi dan sebagainya, itu saja. bagian dari politik identitas nasional yang primitif.

Demokrasi yang idealnya menampilkan diri sebagai negara inklusif, egaliter, dan mengedepankan kebebasan sipil, justru terpuruk akibat praktik politik identitas. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana demokrasi menjadi pintu kebangkitan besar-besaran politik identitas melalui konflik, kekerasan, dan bentuk diskriminasi terhadap kelompok lainnya.²

Politik di Indonesia selalu banyak mengalami ketidakstabilan. Hal ini terjadi dikarenakan sistem pemerintahan yang berganti-ganti. Pada era reformasi, demokrasi di Indonesia sudah jauh lebih baik dari era sebelumnya. Namun, hal yang sangat melekat dengan politik di negara ini adalah politik identitas. Politik identitas merupakan pembagian identitas politik yang dianut oleh warga negara berdasarkan arah politiknya. Kelompok-kelompok sosial yang merasa terpinggirkan atau didiskriminasi oleh struktur pemerintahan yang didominasi oleh entitas tertentu, sering kali menemukan diri mereka terdorong untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka melalui politik identitas. Dalam situasi di mana mereka merasa tidak terwakili atau diabaikan oleh kebijakan pemerintah, munculnya politik identitas menjadi respons alami dari kelompok-kelompok ini. Politik identitas menjadi alat untuk membangkitkan kesadaran akan keberadaan mereka, menyuarakan tuntutan mereka, dan memperjuangkan hak-hak yang dianggap terabaikan atau tidak diakui oleh pemerintahan yang ada. Ini merupakan hasil dari ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu, yang kemudian mengarah pada pengorganisasian diri mereka dalam upaya untuk mendapatkan representasi yang lebih kuat dan

² I Putu Sastra Wingarta et al., "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–24, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>.

pengakuan terhadap identitas dan kebutuhan mereka. Dalam beberapa kasus, politik identitas menjadi bentuk ekspresi penting dalam mengekspresikan aspirasi kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya terpinggirkan dan menjadi peran kunci dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat.

Politik identitas menjadi potensi ancaman bagi demokrasi di Indonesia karena adanya pembentukan aspirasi politik yang terpusat dalam beberapa kelompok, baik itu partai politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang terkait erat dengan identitas tertentu. Ketika politik diwarnai oleh identitas khusus, risikonya adalah terpecahnya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang bersaing satu sama lain untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih mengutamakan identitas mereka sendiri daripada kepentingan bersama. Fenomena ini bisa mengancam kohesi sosial yang diperlukan dalam sistem demokrasi yang sehat, menggantikan perdebatan dan dialog inklusif dengan pertarungan antarkelompok yang cenderung polarisasi. Akibatnya, kesatuan dalam keberagaman terancam, menyisakan celah bagi fragmentasi sosial yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang inklusif dan adil. Stabilitas negara akan mengalami kehancuran jika dalam demokratisasi negara tercipta pertentangan pada kelompok-kelompok identitas. Kelompok-kelompok identitas yang lebih mengedepankan suatu golongan untuk mendapatkan pengaruh politik menjadi salah satu faktor yang dapat memicu adanya politik identitas. Faktor lain yang dapat memicu adanya politik identitas dalam demokrasi Indonesia ialah sistem politik dan peranan aktor dalam mengelola politik identitas.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif. Metode normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap hukum, peraturan, kebijakan, atau norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau masyarakat. Penulis mengumpulkan bahan hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Setelah itu, penulis melakukan studi secara mendalam terhadap bahan

hukum tersebut. Penulis menggunakan pendekatan analisis normatif untuk mengevaluasi konsistensi, kesesuaian, dan efektivitas norma-norma yang ada. Analisis ini melibatkan perbandingan antara norma yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Metode normatif juga melibatkan interpretasi dan penafsiran terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Penulis akan menggunakan pengetahuan dan pemahaman hukum yang mendalam untuk mengidentifikasi implikasi dan konsekuensi dari norma-norma yang diteliti. Hasil penelitian menggunakan metode normatif ini akan berupa analisis, interpretasi, dan evaluasi terhadap norma-norma yang ada. Kesimpulan yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan perubahan atau perbaikan dalam sistem hukum atau kebijakan yang diteliti. Dalam artikel ini, metode normatif digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metode ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang konsistensi dan kesesuaian norma-norma dalam konteks yang diteliti.

B. Pembahasan

B.1 Praktik Politik Identitas di Indonesia

Menurut Lukmantoro, politik identitas adalah politik yang memprioritaskan kepentingan anggota kelompok yang mempunyai keselarasan personalitas atau karakteristik dalam hal ras, etnis, gender, atau agama.³ Politik identitas adalah perbuatan politik yang bermaksud untuk memodifikasi politik dan membidikkan usaha untuk memantau nilai-nilai yang disangka penting sampai tuntutan yang paling mendasar, yaitu penetapan kodrat sendiri atas dasar primordialitas. (seperti suku, agama, ras, adat istiadat, dll) untuk membentuk pemerintahan atau negara sendiri yang terlepas dari negara induknya.

³ Sukamto, "Politik Identitas (Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Dan Interaksi 'Lokalitas' Dan 'Globalisasi')," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 2, no. 2 (2010).

Di Indonesia lebih banyak fokus pada masalah agama, etnisitas, ideologi, dan masyarakat yang relevan melalui perluasan daerah. Masyarakat dalam ketidakadilan menggunakan berita untuk membuat politik bargaining. Namun, tujuan masyarakat hanya dianggap sebagai keinginan untuk memimpin sekelompok orang untuk menggapai maksud ekonomi dan politik. Yang mendeskripsikan bahwa desentralisasi memainkan peran penting dalam munculnya politik identitas, karena ketika pemerintah pusat memberikan banyak kekuasaan ke daerah selama era reformasi, masyarakat memiliki posisi yang kuat atas kewenangan di kalangan politik lokal. Informasi etnisitas, suku, agama, dan golongan digunakan sebagai politik untuk memperoleh kekuasaan dalam praktik politik yang didesentralisasi.

Dalam dimensi keetnisan, politik identitas pada awalnya tergambar berawal dari usaha untuk mengintegrasikan kualitas suku atau adat ke dalam pengaturan daerah. Misalnya ada tuntutan agar nilai-nilai budaya dan hukum adat suku tertentu diakomodasi dalam peraturan daerah setempat. Politik identitas etnis juga bisa muncul dengan tuntutan memisahkan satu wilayah dengan mayoritas suku tertentu menjadi wilayah administrasi pemerintahan baru. Bahkan bisa berlanjut sampai tuntutan mendapatkan otonomi khusus, seperti yang pernah dituntut GAM di Aceh atau RMS di Maluku. Pada akhirnya, politik identitas etnis dapat memunculkan gerakan separatis. Dengan kata lain, mengklaim separuh tanah air dan membentuk negara baru berdasarkan satu suku atau etnis dengan alasan perbedaan latar belakang etnis.

Dalam arena politik, politik yang didasarkan atas etnis biasanya digunakan menjadi perangkat untuk memperoleh kekuasaan secara struktural. Ini digunakan untuk memperoleh kekuasaan melalui identitas etnis dan digunakan untuk menang dalam pertempuran. Politik identitas dirupakan perangkat untuk validitas politik ditahap supra desa. Politik identitas di supra desa menonjolkan bagaimana masyarakat politik dibentuk akibat hubungan kepentingan politik yang diambil oleh kemampuan aset seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mekanisme baru untuk mendapatkan keuntungan yang dikenal dengan istilah rent seekin telah mengambil alih kekuasaan politik supra desa.

Sementara Dalam konteks agama, politik identitas tampak dalam beragam usaha kelompok agama tertentu untuk memasukkan nilai-nilai dan pandangan agama mereka ke dalam langkah penyusunan kebijakan publik di taraf lokal. Upaya ini misalnya ditandai dengan fenomena peraturan daerah bernuansa syariah Islam yang muncul di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok-kelompok Islam konservatif menyerukan agar aturan dan hukum Islam dimasukkan ke dalam peraturan daerah setempat. Selain itu, politik identitas agama juga ditandai dengan upaya untuk menciptakan kota atau daerah yang seolah-olah hanya identik dengan satu identitas agama saja. Misalnya, dengan mendorong berbagai simbol, nilai-nilai, hingga kepentingan agama tertentu yang mendominasi ruang publik di kota tertentu. Hal ini dapat berpotensi menjadi diskriminatif dan tidak menghargai keberagaman serta minoritas agama lain yang ada di wilayah tersebut.⁴

Sementara itu, Cressida Hayes menginterpretasikan politik identitas sebagai ciri aktivitas politik. Dalam arti yang kian luas, politik identitas berkaitan dengan menghindari keadaan keterpinggiran, terutama yang berkaitan dengan keanggotaan kumpulan dalam komunitas yang lebih besar. Perlu diingat bahwa politik identitas adalah istilah lain untuk biopolitik, yang merujuk pada kelompok-kelompok yang diidentifikasi oleh sifat biologis atau tujuan biologis mereka dari sudut pandang tertentu, seperti politik ras dan gender.⁵ Politik ras adalah strategi politik yang digunakan kelompok etnis atau ras tertentu untuk mendapatkan atau mempertahankan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya untuk memajukan kepentingan ras mereka. Misalnya, politisi Jakarta pernah menyudutkan kelompok etnis Tionghoa demi meraih simpati pemilih pribumi. Sedangkan politik gender adalah gerakan yang mendorong kesetaraan gender, memberdayakan perempuan serta mereformasi sistem dan kebijakan yang diskriminatif melalui tindakan politik. Misalnya dengan memperjuangkan kuota 30% perempuan di parlemen, menghapuskan kekerasan politik terhadap

⁴ Juhana Nasruddin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)," *Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018): 36.

⁵ Cressida Heyes, *Politik Identitas* (Amerika Serikat: Stanford Encyclopedia of Filsafat, 2007).

perempuan, dan memerangi ketidaksetaraan akses perempuan terhadap sumber daya.

Menurut Agnes Heller, Gerakan politik yang disebut politik identitas berpusat pada perbedaan sebagai tingkatan politik utama.⁶ Artinya sekelompok orang yang secara kolektif mengejar tujuan-tujuan politik tertentu. Gerakan politik identitas ini berfokus dan menjadikan perbedaan identitas, seperti ras, etnis, agama, dll sebagai isu sentral. Perbedaan identitas tersebut dijadikan sebagai kategori politik utama, dianggap sebagai kategori pemisah yang paling penting antara "kita" dan "mereka" dalam arena politik. Politik identitas cenderung mengklaim bahwa identitaslah yang paling fundamental dan mendefinisikan posisi serta kepentingan politik seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Intinya politik identitas meletakkan penanda identitas sebagai fondasi utama, dan seringkali satu-satunya, dalam membangun dan memobilisasi kelompok dan gerakan politik. Politik identitas timbul atas dasar ingatan perseorangan untuk mengekspresikan dan mengembangkan personalitas spesifik mereka dengan membangun relasi sosial dan politik dengan individu lain berdasarkan kesamaan identitas primordial seperti etnis dan agama. Misalnya, pemilih Muslim cenderung membangun relasi dan mendukung kandidat dan partai tertentu berdasarkan kesamaan identitas keislamannya. Begitu pula individu etnis Tionghoa cenderung merasa terhubung secara politik dengan politisi yang juga etnis Tionghoa.

Namun, dalam proses selanjutnya Kelompok mayoritas justru menyalahgunakan dan merengkuh politik identitas untuk membangun kekuasaan. Namun, hal itu justru memperuncing perbedaan dan memprofokasi konflik, tetapi bukan berarti tidak mendapat ulasan rancap. Berdasarkan identifikasi primordialitas, politik identitas seolah-olah menegaskan bahwa ada kesatuan yang esensial mengenai eksistensi golongan sosial tertentu.

⁶ Abdillah S, *Politik Identitas: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas* (Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2002).

Agnes Heller mengartikan politik identitas menjadi semacam rancangan dan guncangan politik yang menekankan perbedaan sebagai tingkatan politik primer. politik identitas menaruh perhatian utama pada perbedaan identitas, seperti perbedaan agama, suku, ras, gender, orientasi seksual. perbedaan identitas tersebut dianggap sebagai pemisah utama antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka mobilisasi politik. Identitas dipandang lebih penting dari faktor lain. Jadi, politik identitas meletakkan identitas (agama, suku, dll) sebagai fondasi utama untuk membangun kelompok serta mengejar kepentingan politik tertentu. Perbedaan dipandang sebagai hal yang sangat mendefinisikan politik seseorang. Meskipun semua komunitas memiliki ideologi dan tujuan yang sama, tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas memiliki tipe individu yang berbeda dengan personalitas sendiri-sendiri.

Teori umum tentang politik identitas dan beragam temuan eksplorasi menampilkan bahwa agama dan etnisitas adalah dua komponen utama yang membuat politik menarik, muncul, dan berdampak dalam jalan politik. Pertama, tatkala agama dan etnisitas membentuk aspek yang diserahkan, identitas kelompok harus dipertahankan. Kedua, proses politik harus kompetitif. Ini menunjukkan bahwa proses politik menyebabkan kelompok identitas bersaing satu sama lain tanpa memihak siapa pun. Akibatnya, dari awal tidak jelas siapa yang terbaik. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana aktor-aktornya menangani masalah seperti etnis dan agama.

B.2 Faktor-faktor yang bisa memicu adanya politik identitas pada pemilihan Presiden

Suatu hal yang sangat menakjubkan tentang politik identitas dan nasionalisme adalah bahwa itu menunjukkan sejarah politik identitas dan nasionalisme di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas dan nasionalisme mendapat tempat yang sangat penting. Baik dalam studi keilmuan atau praktik politik dan sosiologi. Salah satunya adalah bahwa dasar politik identitas dan sosiologi telah ada atau digunakan sejak lama dalam studi

pascakolonial. Politik identitas semakin diakui dalam praktik politik sebagai hasil dari persaingan untuk kekuasaan politik terutama menjelang pesta demokrasi besar Indonesia yang akan diadakan pada tahun 2024 melalui agenda besar yang dikenal sebagai PILPRES.⁷ Politik identitas telah didefinisikan oleh seorang pakar politik dari Universitas Duke, Donald L. Morowitz.

Banyak identitas hidup di lingkungan yang berbeda, yang memungkinkan konflik yang disebabkan oleh masalah perbedaan. Hal-hal seperti itu sering terjadi di sekitar kita, dan untuk menangani perkembangan politik identitas hubungan dengan bijak, kita harus berinteraksi dengan perbedaan antar kelompok dan golongan, seperti etnis, suku, agama, dan ras. Ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap toleransi. Menurut Perdana, perspektif toleransi adalah salah satu ide yang terkait dengan perkembangan politik identitas saat ini.⁸ Pandangan ini dapat diterapkan pada banyak hal, seperti toleransi sosial, toleransi budaya, dan toleransi politik, antara lain. Dalam negara-negara dengan populasi yang beragam atau negara majemuk, perspektif toleransi politik ini mungkin sesuai.⁹

Perjuangan berjuang antara nasionalisme dan agama menjadi salah satu unsur yang berkontribusi terhadap politik identitas di Indonesia. antara nasionalisme dan agama merupakan salah satu elemen yang berkontribusi terhadap politik identitas di Indonesia. Seperti diketahui terkenal keinginan setiap masyarakat yang berbeda-beda bermula dari persoalan politik identitas. Fakta bahwa setiap komunitas mempunyai keinginan yang berbeda-beda bermula dari persoalan politik identitas. Hal ini terjadi di Indonesia ada dua kelompok yang secara ideologi bertentangan-bertentangan secara ideologi yang mendukung nasionalisme dan kelompok yang mendukung agama. kelompok mereka yang mendukung nasionalisme dan mereka agama. Namun landasan

⁷ Tutukansa, "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia."

⁸ Andre Pebrian Perdana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance," *Jurnal Kelitbangan*, 2017.

⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

agama yayasantelah membantu membentuk dasar negara Indonesia, Pancasila, yang didasarkan pada prinsip ketuhanan, dan telah menjadi sumber bukti penting sepanjang sejarah kemerdekaan negara telah membantu membentuk dasar negara Indonesia, Pancasila, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan, dan telah menjadi sumber bukti penting sepanjang sejarah kemerdekaan negara ini. Sentimen sentimencinta dan kebangsaan itulah yang dimaksud dengan nasionalisme. Dari cinta dan kebangsaan adalah apa yang dimaksud dengan nasionalisme. Di Indonesia, nasionalisme ditandai dicirikandengan oleh rasa kerukunan antar suku, agama, etnis, dan lain-lain rasa keharmonisan lintas suku, agama , etnis.

Kekacauan ini terjadi karena kepentingan politik para elit politik untuk mempertahankan dan mengambil kekuasaan di negara ini. Mereka melakukannya dengan menggunakan identitas keagamaan, digunakan untuk propaganda politik dan perebutan kekuasaan. Ini dapat menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai cara untuk memanipulasi orang Indonesia melewati propaganda yang mereka pakai. Pada masa pemilihan umum, masalah ini lebih sering muncul karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menggunakan senjata utama mereka, penggiringan opini tentang lawan politik mereka, untuk menghapus lawan mereka dari politik. Ini menyebabkan konflik antara identitas nasionalisme dan keagamaan, dapat dikatakan merusak reputasi Pancasila.¹⁰

Bahkan sebelum ada istilah politik identitas sendiri, contoh politik identitas telah lama digunakan dalam masyarakat. Kata dari politik identitas digunakan pada awal pada tahun 1974 oleh Combahee River Collective dan Barbara Smith, seorang wanita kulit hitam, yang pertamakali menyuarakan identitas sebagai anggota masyarakat yang mempunyai wanita kulit hitam.¹¹ Contoh global dari politik identitas adalah sebagai berikut:

1. Politik identitas rasial

¹⁰ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas," 2019.

¹¹ Widyawati, "Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial Dan Etnis," 2021.

Pertama dari identitas politik adalah budaya dan ras. Ketika Sistem Partai Kedua dan Partai Ketiga berkuasa pada abad ke-19, jenis identitas politik ini sempat muncul di Amerika Serikat. Politik identitas rasial ini sangat penting di Amerika Serikat sejak undang-undang buruk dihapus. Setelah itu, pada tahun 2000, ketika Barack Obama, presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, menjabat sebagai presiden, politik identitas ini kembali menjadi perhatian.

2. Politik identitas gender

Banyak orang masih memperjuangkan politik identitas gender karena representasi gender yang sama dalam ranah politik dapat membuat masyarakat merasa mempunyai alat di mana semua dapat berpendapat dan didengar oleh semua orang. Adanya perwakilan yang seimbang dari berbagai identitas gender di panggung politik memberikan rasa memiliki kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk memiliki sarana yang kuat dalam menyuarakan kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman yang sering kali terpinggirkan. Dengan adanya representasi yang inklusif, masyarakat merasa dihargai, didengar, serta diberikan perhatian yang luas terhadap permasalahan yang berkaitan dengan identitas gender mereka. Ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk merasa terwakili secara lebih baik dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga, politik identitas gender bukan hanya sekadar alat bagi mereka untuk bersuara, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam mendorong kesetaraan dan keadilan dalam politik yang mencerminkan keragaman masyarakat secara menyeluruh.

3. Politik identitas maori

Di Selandia Baru sendiri, karena ada persaingan yang jelas antara non-Maori, politik identitas Politik Selandia Baru secara keseluruhan pernah mempermasalahkan pan-Maori. Meskipun politik identitas pan-Maori, yang jelas berbeda dengan Pakeha dan orang kulit putih Selandia Baru, membantu menciptakan dasar untuk berkolaborasi internal dengan pihak politik kekuatan.

4. Politik identitas kulit putih

Jenis politik identitas kulit putih meningkat setelah presiden ke-45 terpilih. Politik identitas ini muncul di ruang politik, khususnya di Partai

Republik. Jeffrey Kaplan dan Leonard Weinberg sebelumnya telah berspekulasi pada tahun 1998 bahwa pada akhir abad ke-20 akan ada peningkatan politik identitas ras kulit putih. Hal ini akan menciptakan narasi tentang keluhan populis dan mendorong agenda permusuhan terhadap ras non-kulit putih.

Sebenarnya, perselisihan mengenai politik identitas berasal dari perbedaan pendapat tentang konsep dan penempatannya. Konteks ini mencakup ruang dan waktu, serta keadaan tersebut. Politik identitas dikatakan konsep tidak dapat lepas dari konteksnya karena konteks berfungsi sebagai acuan untuk memaknai dan memahami konsep tersebut. Konsep politik identitas juga dapat menciptakan pengetahuan baru yang salah. Bidang ilmu sosial melihat politik identitas sebagai alat untuk memberi pemikiran ideologi politik, keperluan politik, dan keinginan. Bahkan mereka mendorong gerakan untuk mencapai tujuan politik tersebut. Dalam politik identitas, ras, suku bangsa dapat digunakan sebagai sumber.

Kelompok minoritas dan marjinal biasanya menggunakan politik identitas untuk melawan ketidakadilan atau ketimpangan sistem. Disiplin kesukuan, gender, dan agama diberitaskan secara jelas, kuat saat kelompok pendukung politik identitas menyuarakan keinginan mereka. Contoh identitas politik yang dapat ditemukan di dalam dan di luar negeri melalui gerakan sosial politik termasuk gerakan Afro-Amerika yang mendukung persamaan ras, gerakan LGBT yang menuntut nikah sama jenis di beberapa negara Barat, gerakan adat yang mendukung hak untuk mengelola tanah ulayat, dan gerakan gender yang mendukung kesetaraan dan keadilan dalam ketenagakerjaan. Dua kesamaan dapat ditemukan di antara ilustrasi di atas. Pertama, politik identitas memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, temporal, budaya, dan geografis. Kedua, kelompok yang termarjinalisasi mendorong gerakan politik identitas.

B.3 Implikasi Praktik Politik Identitas Terhadap Pelembagaan Demokrasi

Praktik politik identitas dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelembagaan demokrasi. Pelembagaan demokrasi sendiri merujuk pada proses pembentukan dan pengaturan lembaga-lembaga politik dalam suatu negara yang mendorong praktik-praktik demokratis, seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Di Indonesia dapat ditemukan, dimana demokrasi dijadikan sebagai jalan untuk kebangkitan politik identitas secara masif melalui bentuk konflik, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok lain.¹²

Politik identitas telah menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia sejak pasca reformasi. Identitas seringkali digunakan sebagai alat politik dalam setiap terjadinya pemilihan umum, baik itu pada tingkat pemilu kepala daerah dan juga pemilu presiden untuk mendapatkan suara rakyat maupun dukungan massa. Hal tersebut berdampak pada keberpihakan terhadap salah satu pihak karena menggunakan identitas yang membuat seolah-olah wajib untuk memilih sesuai dengan suku, ras, agama, dan identitas daerah masing-masing. Akhirnya, dinamika demokrasi tidak lagi sesuai, seharusnya setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih.¹³ Selain itu, dengan adanya politik identitas dalam praktik politik di Indonesia juga dapat mempengaruhi ketahanan nasional, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia.

¹² I Putu Sastra Wingarta et al., "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia."

¹³ Husni Mubarak, "Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial: Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 11 (2018): 365–400.

Dalam praktik politik identitas sebenarnya tidak sepenuhnya berdampak negatif jika dikelola secara baik, dengan mengedepankan moralitas politik.¹⁴ Namun, jika hal tersebut hilang yang terjadi berikutnya adalah permasalahan yang berakibat konflik SARA, fundamentalisme, radikalisme agama dan manuver politik yang penuh propaganda kebencian terhadap pihak lain yang kemudian terjadi polarisasi politik yang lebih tinggi. Ketika politik identitas menjadi fokus utama dalam praktik politik, hal ini dapat mengakibatkan pembentukan kubu-kubu politik yang saling bertentangan berdasarkan identitas tertentu, seperti agama, etnis, atau gender. Hal ini dapat mempersulit proses demokrasi karena memunculkan konflik yang lebih besar antara kelompok-kelompok tersebut. Politik identitas dalam demokrasi yang seharusnya mempersatukan sebagaimana yang di contohkan oleh para guru bangsa sebelum dan pada awal kemerdekaan itu malah bergerak kearah yang mengancam persatuan.

Penggunaan media sosial dalam politik semakin menambah permasalahan dalam pemilu maupun polarisasi politik. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dan pandangan politik yang cepat dan luas, termasuk politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁵ Media sosial juga rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda dan polarisasi politik yang dapat memecah belah masyarakat. Gosip, hoax, rumor serta spekulasi yang beredar dari buzzer dengan cepat tersebar sedangkan minat literasi media sosial yang rendah membuat masyarakat gampang percaya tanpa memilah mana yang benar dan akurat serta yang tidak. Selain itu, media sosial juga dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terutama generasi milenial, yang cenderung lebih aktif di media sosial. Media sosial dapat mempengaruhi

¹⁴ Yana Schovad Mansurni Abadia, Cenruang Alungb, Iman Permadic, "Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 142–65.

¹⁵ Arus Reka Prasetia, "Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu," *Conference on Communication and New Media Studies*, 2019, 21–33.

preferensi politik masyarakat, terutama dalam pemilihan umum. Bahkan ada yang memilih presiden karena feeds instagramnya bagus. Hal ini dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia, karena politik identitas dapat mengalahkan substansi isu dan program dalam pemilihan umum.

Praktik politik identitas dapat mengarah pada diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam sistem politik. Ketika identitas tertentu menjadi dasar utama bagi partisipasi politik, hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan politik dan sumber daya publik. Politik identitas menempatkan ciri-ciri primordial suatu kelompok sebagai fokus perjuangan politiknya. Hal ini dapat memarginalkan kelompok lain yang tidak memiliki identitas politik yang sama. Kelompok mayoritas identitas tertentu juga bisa menggunakan kekuatan politiknya untuk mendominasi kelompok minoritas lain, seperti kelompok etnis atau agama mayoritas memaksakan kepentingannya dalam kebijakan publik. Hal tersebut memicu berbagai kasus kekerasan, intoleransi, serta penguatan sentimen identitas berdasarkan etnis dan agama, yang kemudian digunakan oleh elit politik untuk memperoleh kekuasaan, terutama menjelang pemilihan umum.¹⁶ Masyarakat juga menjadi tidak memiliki preferensi pasti dalam memilih, dan partai politik menggunakan praktek money politics untuk mendulang suara. Demi meraih dukungan politik, kelompok identitas diprovokasi untuk menyerang satu sama lain oleh para politisi dan kelompok yang merasa dirugikan akan melakukan tindakan radikal dan kekerasan saat tuntutan politik identitasnya tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, politik identitas dapat menjadi ancaman bagi demokrasi karena aspirasi politik yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok identitas tertentu, seperti partai politik atau LSM yang terasosiasi dengan identitas tertentu, dapat mengakibatkan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu dilibatkan edukasi politik

¹⁶ Mahpudin Mahpudin, "Kebangkitan Politik Identitas Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Sosial Politik* 7, no. 2 (2021): 148–60, <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>.

serta penekanan pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam praktik politik di Indonesia.

Selain itu, politik identitas memiliki potensi untuk menjadi penghambat signifikan dalam proses pembentukan kebijakan yang inklusif dan representatif. Ketika agenda politik didorong oleh identitas tertentu, risikonya adalah pementingan kelompok tersebut menjadi fokus utama, menyebabkan terabaikannya kepentingan bersama atau umum. Dalam konteks ini, kepentingan yang lebih luas dari seluruh masyarakat dapat terperangkap atau bahkan diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan penghambatan dalam upaya untuk merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi seluruh warga negara. Dalam esensi pembentukan kebijakan yang demokratis, pentingnya menegakkan kebutuhan bersama sebagai landasan kebijakan tidak boleh terganggu oleh dominasi politik identitas, yang pada gilirannya dapat merusak esensi inklusivitas dan representasi dalam proses kebijakan publik.

Dengan demikian, praktik politik identitas dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap pelembagaan demokrasi. Untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan baik, penting untuk memperhatikan dampak dari praktik politik identitas dan berupaya untuk mempromosikan partisipasi politik yang inklusif dan representatif bagi semua warga negara. Selain itu, beberapa upaya juga bisa dilakukan. Misalnya, dengan membangun institusi penyelenggara pemilu dan parlemen yang independen dan non-partisipan. Hal tersebut penting agar proses politik tidak dikuasai kepentingan identitas tertentu. Selain itu, mendorong partai politik untuk bersifat inklusif dengan membuka keanggotaan dan kepemimpinan bukan berbasis identitas tunggal dan juga menerapkan sistem pemilihan umum yang proporsional serta memberikan representasi minimum bagi kelompok minoritas untuk duduk di parlemen. Dengan demikian, politik identitas diharapkan tidak mengganggu jalannya sistem demokrasi dan justru semakin substantif serta berkeadilan.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Dalam tinjauan yang mendalam terkait praktik politik identitas yang semakin mendominasi proses politik menjelang Pemilu 2024 di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa politik identitas memainkan peran yang signifikan dalam menentukan dinamika demokrasi. Meskipun menjadi strategi yang sering digunakan untuk memperoleh dukungan politik, praktik politik identitas juga membawa implikasi yang kompleks terhadap aspek-aspek krusial demokrasi. Untuk mengembangkan demokrasi yang inklusif dan kuat, diperlukan langkah-langkah proaktif. Ini termasuk pendidikan politik yang mempromosikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, regulasi yang memastikan transparansi dalam kampanye politik, dialog publik yang inklusif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Pemilu 2024 merupakan momentum krusial untuk merefleksikan bagaimana praktik politik identitas dapat dikelola sedemikian rupa sehingga memperkuat, bukan melemahkan, esensi demokrasi. Dengan mengambil langkah-langkah strategis yang diarahkan pada memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, diharapkan Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

C.2. Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mengelola politik identitas diantaranya adalah penguatan pendidikan politik, regulasi yang mendorong transparansi, memperkuat dialog publik, serta penguatan partisipasi politik. Dengan memperhatikan saran tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan mendukung perkembangan demokrasi yang inklusif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Heyes, Cressida. *Politik Identitas*. Amerika Serikat: Stanford Encyclopedia of Filsafat, 2007.
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, and Reda Wicaksono. “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–24. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>.
- Mahpudin, Mahpudin. “Kebangkitan Politik Identitas Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia Pasca Orde Baru.” *Jurnal Sosial Politik* 7, no. 2 (2021): 148–60. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>.
- Mansurni Abadia, Cenruang Alungb, Iman Permadic, Yana Schovad. “Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu.” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 142–65.
- Mubarok, Husni. “Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial: Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 11 (2018): 365–400.
- Nasruddin, Juhana. “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022).” *Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018): 36.
- Perdana, Andre Pebrian. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance.” *Jurnal Kelitbangan*, 2017.
- Prasetya, Arus Reka. “Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu.” *Conference on Communication and New Media Studies*, 2019, 21–33.
- S, Abdillah. *Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2002.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. "Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas," 2019.

Sukanto. "Politik Identitas (Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Dan Interaksi 'Lokalitas' Dan 'Globalisasi')." *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 2, no. 2 (2010).

Tutukansa, Aldho Faruqi. "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia," 2019, 67.

Widyawati. "Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial Dan Etnis," 2021.